

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- AA Andi Prajitno. 2010. *Pengatahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Cetakan I. Surabaya. Putra Media Nusantara.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.
- Achmad Ali. 2010. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Tera.
- Habib Adjie, 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Surabaya. Refika Aditama.
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Buku II. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Surabaya. CV. Mandar Maju.
- , 2010. *Majelis Pengawas Notaris*. Surabaya. Refika Aditama
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Bandung. Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2008. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung. Nusa Media.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta. IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.
- Indoharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan. 2009. *KeNotaris*. Jakarta. Raih Asa Sukses.
- J.C.S Simorangkir. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta. Aksara Baru. Jakarta.

- M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Abdulkadir. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon, Phipilus & Tatik Sri Djatmiati. 2007. *Tentang Wewenang*, Edisi V. Surabaya. Majalah Yurdika.
- Otje Salman dan Anton F Susanti. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. Jakarta. Rafika Aditama Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya. fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- , 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Philupus M. Hadjon. 1966. *Penegakan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelompokan Lingkungan Hidup*. Surabaya. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Riatio. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit.
- Ridwan, HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta. Rajawali Press.
- Salim H.S. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis. Kewenangan Notaris. Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

-----, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

-----, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta. Liberty.

-----, 2012. *Teori Hukum. Edisi Revisi*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14. Bandung. Alfabeta.

Sujamto. 1987. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Victor M. Situmorang. S.H dan Dra. Cormentyna Sitanggang. 1992. *Grosse Akta*. Jakarta. Rineka Cipta.

Wawan Setiawan. 2004. *Notaris Profesional*. Jakarta. Media Notariat.

W.J.S Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta. Balai Pustaka.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

C. Website

Kamus Besar Bahasa

Indonesia. <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/pembinaan.html> diakses tanggal 17 Maret 2021 Pukul 20.08 WIB

M. Syahrul Boorman.
Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. 2019. <file:///C:/Users/user/Downloads/1920-4964-2-PB.pdf>. diakses tanggal 19 Mei 2021 Pukul 9.20 WIB

Muhammad Farhan Aditya Putra. Pengawasan dan Pembentukan Qanun di Kabupaten Aceh Tengah oleh Pemerintah Daerah. 2014. <http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/BAB%20ii.pdf> diakses tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.15 WIB

Sovyedi Andasmita. Sistem administrasi dan tata kelola kantor Notaris. 2011. <https://hasyimsoska/2011/06/sistem-administrasi-dan-tata-kelola.html> diakses tanggal 15 April 2021 Pukul 21.30 WIB.

Wulandati Heru. 2016. <http://repository.unpas.ac.id/41906/1/J%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.20 WIB

